

'BI Harus Perbaiki Tata Kelola'

BANDUNG -- Guna menghindari jeratan hukum saat akhir masa jabatannya, maka Bank Indonesia (BI) harus memperbaiki tata kelola bank sentral tersebut. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki, mencatat hampir setiap pejabat tinggi BI harus berhadapan dengan masalah hukum pada akhir periode masa jabatannya.

"Ini sebenarnya mencerminkan betapa berat beban tugas BI," ujarnya. Ruki hadir sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional "Tata Kelola Bank Sentral" yang digelar di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (10/10).

Mantan Gubernur BI Soedrajat Djiwandono dan Syahril Sabirin, lanjut Ruki, tercatat harus berurusan dengan masalah pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan tiga pejabat tinggi BI dipidana. Setelah

itu, giliran Burhanuddin Abdullah yang menjalani proses hukum dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Bahkan, kata Ruki, BI ketika dipimpin oleh Boediono yang saat ini menjabat Wakil Presiden masih tersandung kasus Bank Century. "Saya melihat persoalan ini dari aspek 'good governance' yang perlu dicermati, perlu diciptakan tata kelola yang baik di Bank Indonesia," ujarnya.

Ruki mengatakan, saat ini, telah tersedia dua perangkat hukum sebagai perangkat pengawasan terhadap BI untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja.

Perangkat hukum itu adalah UU No 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang yang menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan ter-

tentu atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Sedangkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Ruki, juga menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan atau kegiatan pengawasan bank setelah fungsi tersebut berpindah ke OJK. "Dengan adanya dua UU tersebut, maka BI semakin dikontrol dan diharapkan bisa memperbaiki tata kelolanya," kata Ruki.

Dikatakan Ruki, sejak 2003 hingga 2012, BI telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Namun menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, ucap dia, BI masih harus memperbaiki diri agar bisa menjadi lembaga independen yang akuntabel dan transparan. ■ antara, ed: agus yulianto